

Estetika Kota dan Keberlanjutan Ekonomi: Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Ke *Food Colony* Kabupaten Pamekasan

Authors:

Arisa Nadika Aisyah¹, Oktarizka Reviandani²

e-Mail:

22041010237@student.upnjatim.ac.id, oktarizka.r.adneg@upnjatim.ac.id

Affiliation:

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}

Received : Mei, 11, 2026

Revised : Jun 15, 2026

Accepted : Jun 24, 2026

Available Online: Juni 30, 2026

Corresponding author

Arisa Nadika Aisyah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

22041010237@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan *Food Colony* di Kabupaten Pamekasan merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata sekaligus menyediakan tempat usaha bagi para pedagang. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kondisi kawasan yang belum ramai pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan relokasi PKL ke kawasan *Food Colony* di Kabupaten Pamekasan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, Satpol PP, pedagang kaki lima dan pengunjung *Food Colony*. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan efektif secara estetika namun tidak efektif secara ekonomi akibat penurunan omzet pedagang. Terjadi ketidakefisienan antara besarnya investasi infrastruktur dengan rendahnya aktivitas ekonomi harian. Pada indikator kecukupan dan pemerataan belum terpenuhi akibat rendahnya akses konsumen serta ketimpangan pendapatan antar posisi kios. Responsivitas pemerintah melalui bazar masih bersifat temporer, dan secara sosiologis kebijakan dinilai kurang tepat bagi karakteristik PKL yang bergantung pada pembeli spontan.

Kata Kunci: Evaluasi, Relokasi, Pedagang Kaki Lima, *Food Colony*

Abstract

The relocation policy of Street Vendors (PKL) to the Food Colony area in Pamekasan Regency is a local government effort to create more organized urban areas while simultaneously providing business locations for vendors. However, the implementation of this policy still faces various obstacles, particularly regarding the quiet condition of the area which lacks visitors. This research aims to evaluate the PKL relocation policy to the Food Colony area in Pamekasan Regency using William N. Dunn's policy evaluation theory, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of the Pamekasan Regency Office of

Cooperatives, SMEs, and Labor, the Civil Service Police Unit (Satpol PP), street vendors, and Food Colony visitors. The results of the study indicate that the policy is aesthetically effective but economically ineffective due to a decrease in vendor revenue. There is an inefficiency between the large amount of infrastructure investment and the low daily economic activity. The indicators of adequacy and equity have not been met due to low consumer access and income inequality between kiosk positions. The government's responsiveness through bazaars is still temporary, and sociologically the policy is considered inappropriate for the characteristics of street vendors who depend on spontaneous buyers.

Keywords: Evaluation, Relocation, Street Vendors, Food Colony

PENDAHULUAN

Kabupaten Pamekasan menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Tekanan ekonomi akibat pandemi sempat meningkatkan angka pengangguran secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021, sebelum akhirnya mulai menunjukkan pemulihan secara bertahap hingga tahun 2025. Dinamika TPT di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat secara lebih rinci melalui tabel berikut (BPS, 2025):

Tabel 1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pamekasan

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2020	3,49
2021	3,10
2022	1,40
2023	1,74
2024	1,64
2025	1,33

Sumber: Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2021-2025 (BPS, 2025)

Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal mendorong masyarakat Pamekasan untuk mencari alternatif di sektor informal guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa sektor informal mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan pada periode 2023-2025, yang mencerminkan lemahnya ekspansi sektor formal di daerah tersebut. Sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena aksesnya yang mudah dan persyaratan modal yang relatif minim (Herwanto dkk., 2025).

Meskipun PKL berperan strategis sebagai penyangga ekonomi masyarakat lapisan bawah, keberadaannya yang memanfaatkan ruang publik secara tidak terencana sering kali menimbulkan masalah ketidakteraturan kota. Di Pamekasan, PKL yang berjualan di jalan-jalan protokol dan kawasan ikonik Arek Lancor kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas, penyempitan ruang bagi pejalan kaki, serta gangguan estetika kota. Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Pamekasan meresmikan sentra kuliner Food Colony pada tahun 2023 untuk merelokasi PKL demi mewujudkan tata ruang yang lebih tertib dan estetik.

Namun, implementasi kebijakan relokasi ke Food Colony menghadapi tantangan serius berupa penurunan jumlah pedagang yang aktif menghuni kios. Meskipun telah

disediakan fasilitas kios sebanyak 240 dan fasilitas lainnya, pemanfaatan kios justru menunjukkan tren penurunan secara konsisten dari tahun 2023 hingga 2025. Data penurunan keterisian kios di kawasan Food Colony disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah kios di Food Colony yang terisi

Tahun	Jumlah Kios Yang Terisi
2023	182
2024	175
2025	160

Sumber: Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja, 2025

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu penataan PKL. Surahman dan Anam (2024) meneliti implementasi kebijakan Food Colony dalam konteks pemberdayaan UKM di Pamekasan, yang menyoroti kendala koordinasi lintas sektor. Kusumawardani dan Kriswibowo (2024) serta Jainuri dan Sukmana (2022) mengevaluasi kebijakan serupa di Sidoarjo dan menemukan bahwa penurunan jumlah pengunjung serta keterbatasan fasilitas di lokasi baru menjadi faktor penghambat utama keberhasilan relokasi. Sementara itu, Pristika dan Kurniawan (2021) menggunakan teori William N. Dunn untuk mengevaluasi penataan PKL pada tingkat provinsi di Jawa Timur.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis evaluatif yang mendalam dan komprehensif terhadap kebijakan relokasi di Pamekasan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Berbeda dengan studi sebelumnya di lokasi yang sama yang hanya berfokus pada sisi implementasi umum, penelitian ini menggali alasan mendasar di balik tren penurunan tingkat hunian kios secara konsisten di tengah penyediaan sarana yang secara administratif dianggap lengkap oleh pemerintah. Penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai resistensi pedagang melalui pendekatan evaluatif sistematis untuk mengidentifikasi gap antara desain kebijakan dan kebutuhan riil pedagang

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan Food Colony di Kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari perspektif teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami sejauh mana enam indikator evaluatif William N. Dunn telah terpenuhi dalam pelaksanaan kebijakan relokasi tersebut.

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis secara mendalam efektivitas dan keberhasilan kebijakan relokasi PKL ke Food Colony Pamekasan guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih solutif bagi penataan sektor informal. Review dalam artikel ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi PKL yang lebih berkelanjutan tanpa mengabaikan keteraturan tata ruang kota.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode ini dipilih untuk menelaah fenomena evaluasi kebijakan secara mendalam pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Pendekatan ini bersifat interpretatif, yakni menekankan pada proses penafsiran peneliti terhadap data lapangan untuk memahami makna di balik fenomena relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Lokasi penelitian ditetapkan secara spesifik di sentra kuliner Food Colony, Jalan Kesehatan, Kabupaten Pamekasan.

Fokus penelitian didasarkan pada enam kriteria evaluasi kebijakan publik menurut teori William N. Dunn, yang meliputi (Dunn, 2003): efektivitas (pencapaian tujuan penataan), efisiensi (pemanfaatan sumber daya), kecukupan (kemampuan mengatasi masalah), perataan (keadilan distribusi manfaat), responsivitas (tanggapan terhadap aspirasi pedagang), dan ketepatan (kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan sasaran).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2020). Informan kunci mencakup Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM (Diskopukmnaker Pamekasan), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Satpol PP), para Pedagang Kaki Lima yang direlokasi, serta pengunjung Food Colony. Sementara itu, data sekunder mencakup peraturan daerah, profil instansi, laporan statistik, serta artikel terkait permasalahan relokasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terintegrasi melalui tiga cara: wawancara mendalam untuk menggali perspektif informan, observasi langsung terhadap aktivitas perdagangan di lokasi, serta dokumentasi terhadap arsip resmi dan catatan kebijakan (Hardani dkk., 2020). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur aktivitas paralel: kondensasi data (pemilahan dan penyederhanaan), penyajian data (tabel dan narasi deskriptif), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Fiantika dkk., 2022). Untuk menjamin kualitas temuan, dilakukan uji keabsahan data yang meliputi aspek kredibilitas (credibility), transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas secara khusus diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, perpanjangan waktu pengamatan, serta peningkatan ketekunan peneliti untuk memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Menurut William N. Dunn (Dunn, 2003) efektivitas dalam kebijakan relokasi ini diukur dari sejauh mana tujuan utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yakni penataan ruang kota dan penguatan ekonomi sektor informal, telah tercapai. Kebijakan ini telah menunjukkan keberhasilan dalam aspek penataan tata kota. Kawasan Monumen Arek Lancor dan trotoar jalan protokol yang sebelumnya dipadati pedagang kini telah steril,

sehingga fungsi ruang publik untuk pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas kembali normal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jonnaidi selaku Satpol PP:

“Setelah direlokasi memang telah menciptakan dampak positif, lalu lintas sudah tertib, tidak ada kemacetan, selain itu pejalan kaki sudah tidak terganggu, dan pastinya kota lebih terlihat estetikanya.” (Hasil wawancara April 2026).

Hal ini sejalan dengan (Dewi, 2021), tujuan kebijakan publik pada dasarnya adalah menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem publik.

Gambar 1. Relokasi PKL



PKL sebelum direlokasi



PKL setelah direlokasi

Sumber: Madura.tribunnews.com, (2024), dan Youtube mas alfi (2025)

Namun, jika melihat efektivitas dari sisi pemanfaatan fasilitas secara berkelanjutan, terdapat tren yang mengkhawatirkan. Keberhasilan relokasi fisik tidak serta-merta diikuti oleh stabilitas hunian pedagang di lokasi baru. Hal ini dibuktikan dengan dinamika penurunan jumlah kios (pada tabel 2) yang dihuni oleh para pedagang sejak awal peresmian hingga saat ini.

Berdasarkan Tabel 2, terlihat adanya penurunan jumlah kios yang terisi secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2025, tingkat keterisian hanya mencapai 66,7%, yang berarti terdapat 80 kios yang kosong. Penurunan ini mengindikasikan bahwa daya tarik Food Colony sebagai pusat aktivitas ekonomi belum efektif dalam mempertahankan minat pedagang untuk menetap, karena tujuan penguatan ekonomi belum dirasakan secara nyata oleh para pelaku usaha.

Hal ini terjadi karena sepiunya jumlah pengunjung yang datang ke kawasan Food Colony. Para pedagang melaporkan bahwa omzet harian mereka menurun drastis dibandingkan saat masih berjualan di lokasi lama (seperti Arek Lancor). Hal ini diperkuat oleh salah satu PKL, Bapak Untung:

“Saat awal-awal relokasi masih lumaya, tapi setelah itu tidak, malah cenderung menurun dibanding sebelum pindah. Pembeli di sini masih sepi, jadi penghasilan juga tidak bisa dipastikan.” (Hasil wawancara April 2026).

Penurunan minat beli masyarakat ini menciptakan siklus negatif; sedikitnya pembeli membuat pedagang menutup kios, dan banyaknya kios yang tutup membuat kawasan terlihat sepi sehingga pengunjung semakin malas untuk datang.

Dengan demikian, kebijakan ini efektif dalam mencapai sasaran ketertiban dan estetika kota karena berhasil menghilangkan gangguan di ruang publik utama. Akan tetapi, kebijakan ini gagal mencapai efektivitas dalam aspek pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima, mengingat tren hunian yang terus merosot akibat ketidakmampuan lokasi baru dalam menjamin stabilitas pendapatan bagi para pedagang.

Efisiensi

Efisiensi menurut William N. Dunn (Dunn, 2003) untuk menilai apakah hasil penataan yang dicapai sebanding dengan sumber daya, anggaran, dan tenaga yang telah dikerahkan oleh pemerintah. Menurut Bridgman dan Davis (2018) dalam (Suprayitno dkk., 2024) efisiensi untuk menilai kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal, sehingga menghasilkan keluaran maksimal dengan biaya yang minimal. Dalam proses relokasi ini, pemerintah telah mengerahkan sumber daya manusia yang cukup besar, melibatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keterlibatan tenaga pelaksana ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pendataan, hingga proses sosialisasi dan penertiban di lapangan. Bapak Imam dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja mengatakan:

“Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL ke kawasan Food Colony, pemerintah daerah melalui dinas telah memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari segi tenaga pelaksana maupun sarana prasarana.” (Hasil wawancara Maret 2026).

Upaya pemerintah juga terlihat sangat besar pada aspek penyediaan infrastruktur fisik. Di lahan seluas 3.854 m², pemerintah telah membangun 240 unit kios permanen yang dilengkapi dengan fasilitas listrik, air bersih, area parkir yang luas, musholla, hingga gazebo untuk pengunjung. Penyediaan fasilitas ini menunjukkan upaya efisien untuk menciptakan wadah sentral kuliner yang representatif tanpa membebani pedagang dengan biaya sewa kios.

Namun, jika diukur melalui perbandingan hasil ekonomi pedagang dengan fasilitas yang diberikan, terjadi ketidakefisienan yang nyata. Meskipun kios diberikan secara cuma-cuma, beban biaya operasional harian pedagang (seperti bahan baku dan tenaga kerja) sering kali tidak tertutupi oleh pendapatan harian. Para pedagang merasa usaha yang mereka keluarkan setiap hari tidak sebanding dengan hasil jualan yang minim akibat sepi pengunjung di lokasi relokasi. Hal ini diperkuat oleh salah satu pedagang, Bapak Untung:

“Kalau dibilang sebanding, rasanya belum ya. Soalnya meskipun fasilitasnya ada, tapi kondisi jualannya masih sepi. Jadi usaha yang dikeluarkan tiap hari, seperti beli

bahan dan tenaga untuk jualan, belum bisa ketutup dengan pemasukan.” (Hasil wawancara April 2026).

Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan ini efisien karena mampu mengorganisir berbagai sumber daya untuk menyediakan sarana yang lengkap secara terpadu. Namun secara output, kebijakan ini belum efisien karena manfaat ekonomi yang diterima kelompok sasaran (PKL) masih jauh di bawah standar kelayakan usaha. Inefisiensi ini menunjukkan adanya gap antara besarnya modal pembangunan infrastruktur dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dihasilkan.

Kecukupan

Indikator kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan relokasi mampu memberikan solusi tuntas terhadap permasalahan PKL (Dunn, 2003). Menurut Winarno (2002:186) dalam (Putra & Prabawati, 2020), kecukupan dalam kebijakan publik menunjukkan bahwa tujuan yang telah dicapai melalui pelaksanaan kebijakan telah dirasakan cukup dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Kebijakan ini dinilai sudah cukup memadai dalam menjawab tuntutan penataan kota yang tertib. Keberadaan Sentra Food Colony telah memberikan perubahan signifikan terhadap wajah Kabupaten Pamekasan, di mana jalan-jalan utama tidak lagi terganggu oleh penumpukan kendaraan akibat aktivitas PKL yang berhenti sembarangan di pinggir jalan.

Dari sisi pemenuhan kebutuhan sarana usaha, pemerintah telah memberikan kecukupan fasilitas bagi para pedagang. Tersedianya kios yang bersih, akses air, dan listrik merupakan peningkatan kualitas tempat usaha yang jauh lebih layak dibandingkan saat pedagang masih berjualan di trotoar. Secara normatif, pemerintah telah mencukupi kebutuhan ruang fisik berjualan dan keamanan bagi pedagang.

Akan tetapi, kecukupan fasilitas fisik ternyata tidak menjamin kecukupan keberlangsungan hidup ekonomi pedagang. Akar masalah PKL bukan sekadar tempat berjualan, melainkan akses terhadap pembeli. Fasilitas yang lengkap menjadi kurang bermakna ketika lokasi relokasi masih sepi pengunjung. Bagi pedagang, kebijakan ini belum cukup memberikan jaminan bahwa setelah pindah, mereka masih bisa menghidupi keluarga sebagaimana saat berjualan di lokasi lama. Ibu Aini selaku salah satu PKL, mengatakan:

“Secara umum fasilitasnya sudah ada dan bisa dipakai untuk berjualan, jadi untuk kebutuhan dasar sebenarnya terpenuhi. Tapi kalau untuk mendukung usaha supaya bisa berkembang, masih terasa kurang.” (Hasil wawancara April 2026).

Perspektif pengunjung juga memperkuat kurangnya kecukupan daya tarik kawasan. Meskipun lahan parkir cukup luas, suasana kawasan yang cenderung sepi dan pilihan menu yang semakin terbatas membuat pengunjung enggan kembali datang. Pengunjung lebih memilih mencari lokasi lain yang lebih ramai meskipun secara fasilitas mungkin tidak selengkap Food Colony, yang menunjukkan bahwa kecukupan aspek kenyamanan saja tidak cukup tanpa diikuti oleh keramaian pengunjung. Hal ini diperkuat oleh salah satu pengunjung, Lina menyatakan:

“Sekarang saya sudah jarang ke Food Colony, karena kalau datang ke sana suasananya kelihatan sepi. Banyak tempat yang tidak buka, jadi rasanya kurang menarik untuk didatangi.” (Hasil wawancara April 2026).

Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini sudah "cukup" untuk menciptakan keteraturan ruang, tetapi masih "kurang" dalam menyelesaikan dimensi kesejahteraan ekonomi. Kecukupan dalam dimensi fisik tidak diikuti dengan kecukupan strategi penarikan konsumen yang konsisten. Akibatnya, kebijakan ini baru menyentuh masalah penataan, namun belum menyentuh substansi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi sektor informal.

Perataan

Pada indikator perataan menilai apakah manfaat kebijakan didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh kelompok sasaran (Dunn, 2003). Menurut Rarung, dkk (2019) dalam (Alfiana & Prathama, 2022), perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dirancang dan diterapkan mampu mendistribusikan layanan berdasarkan prinsip kesetaraan manfaat kepada kelompok sasaran kebijakan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menunjukkan upaya pemerataan melalui proses pendataan yang inklusif. Seluruh pedagang yang sebelumnya terdampak penertiban di kawasan Arek Lancor dan jalan protokol diberikan kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan kios di Food Colony tanpa diskriminasi latar belakang.

Keadilan prosedural juga terlihat dari pemberian fasilitas yang seragam bagi seluruh pedagang. Mendapatkan kios dengan ukuran yang relatif sama dan akses yang setara terhadap fasilitas umum seperti toilet dan area parkir. Selain itu, kebijakan pembebasan biaya sewa kios diberlakukan secara rata untuk semua pedagang guna meringankan beban ekonomi mereka selama masa transisi relokasi.

Gambar 3. Fasilitas kios



Sumber: Mediajatim.com (2024)

Selain itu, penertiban juga dilakukan secara menyeluruh. Tidak ada perlakuan khusus atau pengecualian bagi pedagang tertentu; jika suatu area telah ditetapkan sebagai zona steril, maka seluruh pedagang di lokasi tersebut wajib direlokasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecemburuan sosial di antara para pedagang yang mematuhi aturan pemerintah dengan mereka yang mencoba bertahan di lokasi terlarang.

Namun, di tingkat hasil ekonomi harian, terjadi ketimpangan manfaat akibat perbedaan posisi kios di dalam kawasan. Pedagang yang mendapatkan kios di bagian depan merasa lebih diuntungkan karena lebih mudah terlihat oleh calon pembeli. Sebaliknya, pedagang yang berada di posisi belakang atau bagian dalam kawasan sering kali terabaikan oleh pengunjung, sehingga pendapatan mereka jauh lebih kecil dibandingkan rekan-rekan mereka di posisi strategis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Aini selaku salah satu pedagang:

“Kalau dibilang adil sepenuhnya, menurut saya belum. Soalnya ada beberapa lokasi yang lebih ramai dilewati pengunjung, sementara yang lain agak sepi. Jadi yang dapat posisi strategis biasanya lebih diuntungkan. Kami yang posisinya di bagian dalam atau agak jauh dari akses masuk jadi lebih sulit menarik pembeli.” (Hasil wawancara April 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara kebijakan sudah diupayakan pemerataan, namun secara teknis lapangan masih terdapat ketidakadilan manfaat ekonomi. Perbedaan posisi kios menciptakan klasifikasi keuntungan yang berbeda di antara para pedagang. Sehingga, pemerataan yang diharapkan pemerintah baru sebatas pemerataan fasilitas fisik, namun belum mencapai pemerataan distribusi pengunjung dan pendapatan bagi seluruh PKL.

Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana pemerintah daerah peka dan cepat dalam menanggapi keluhan serta aspirasi pedagang pascarelokasi (Dunn, 2003). Tangkilisan (2005) dalam (Ambarwati & Wahyudi, 2024), responsivitas merupakan kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah telah menyediakan forum komunikasi dan mediasi untuk mendengar kendala yang dialami PKL di Food Colony. Aspirasi utama pedagang mengenai penurunan omzet penjualan telah ditanggapi sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Salah satu bentuk respons nyata pemerintah adalah dengan mengalihkan berbagai kegiatan seremonial dan ekonomi daerah ke kawasan Food Colony. Penyelenggaraan acara seperti Bazar Ramadan, Bazar Hari Jadi Pamekasan, dan Bazar Kemerdekaan bertujuan untuk memicu keramaian dan memperkenalkan sentra kuliner ini kepada masyarakat luas. Langkah ini merupakan bukti bahwa pemerintah tidak membiarkan kawasan tersebut sepi tanpa ada upaya intervensi.

Gambar 4. Bazar Ramadan



Sumber: Instagram Diskopukmnaker Pamekasan

Selain itu, penertiban juga dilakukan melalui pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif. Alih-alih langsung melakukan tindakan represif, terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pembinaan agar pedagang memahami urgensi penataan ruang. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dan memastikan bahwa pedagang merasa didengarkan meskipun mereka harus pindah ke lokasi yang telah ditentukan. Hal ini diperkuat oleh Bapak Jonnaidi selaku Satpol PP:

“Sebelum melakukan penertiban, kami terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para PKL. Kami juga mendengarkan keluhan maupun keberatan yang disampaikan pedagang supaya pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik di lapangan.” (Hasil wawancara April 2026).

Meskipun demikian, para pedagang merasa respons tersebut belum memberikan dampak jangka panjang yang signifikan. Dinas terkait memang mampu meningkatkan kunjungan, namun sifatnya hanya sementara (temporer) selama acara berlangsung. Setelah acara berakhir, suasana kawasan kembali sepi, sehingga pedagang menilai respon tersebut belum menjadi solusi struktural bagi masalah sepiunya pengunjung secara harian.

Ketepatan

Indikator ketepatan untuk menilai apakah relokasi ke Food Colony adalah solusi yang benar bagi masalah penataan PKL (Dunn, 2003). Menurut Winarno (2002) dalam (Putra & Prabawati, 2020), Ketepatan berkaitan dengan nilai atau manfaat dari tujuan suatu program serta kuatnya asumsi yang mendasari penetapan tujuan program tersebut. Dari sudut pandang pemerintah, kebijakan ini sangat tepat karena berhasil mengalihfungsikan lahan bekas RSUD menjadi pusat aktivitas produktif. Pilihan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menertibkan PKL tanpa harus menghilangkan mata pencaharian mereka sama sekali. Dengan memusatkan PKL dalam satu sentra kuliner, pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan, pembinaan. Kebijakan ini dianggap lebih tepat

dibandingkan sekadar melakukan pengusiran paksa tanpa memberikan alternatif lokasi berjualan yang layak.

Akan tetapi, jika dilihat dari sisi ekonomi, ketepatan lokasi ini menuai kritik dari para pedagang. PKL menilai bahwa memindahkan mereka dari tempat sebelumnya seperti Arek Lancor dan trotoar ke lokasi yang lebih tertutup adalah langkah yang kurang tepat. PKL sangat bergantung pada konsumen yang lewat secara spontan, dan hal ini hilang ketika mereka dipindahkan ke lokasi yang menuntut niat khusus dari pembeli untuk datang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Aini selaku salah satu PKL:

“Menurut saya, kebijakan ini belum sepenuhnya tepat. Memang dari segi penataan kota jadi lebih rapi, tapi untuk kondisi usaha justru banyak yang kesulitan. Tempatnya sekarang kurang ramai, jadi pembeli tidak sebanyak dulu.” (Hasil wawancara April 2026).

Pengunjung pun memiliki pandangan serupa mengenai ketepatan suasana kawasan. Banyaknya kios yang tidak beroperasi dan suasana yang sunyi membuat Food Colony kehilangan identitasnya sebagai sentra kuliner yang semarak. Bagi pengunjung, lokasi relokasi ini kurang memiliki daya tarik visual dan variasi produk yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke kawasan Food Colony di Kabupaten Pamekasan telah berhasil secara penataan ruang kota dan estetika ruang kota, namun belum berhasil secara substansi pemberdayaan ekonomi pedagang. Kebijakan ini secara efektif telah mengembalikan fungsi ruang publik dan menciptakan ketertiban lalu lintas di kawasan Arek Lancor serta jalan protokol, namun gagal mempertahankan keberlangsungan hunian kios yang terus menurun. Rendahnya tingkat kunjungan pembeli menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas dan kecukupan kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang.

Pemerintah telah berupaya menjalankan prinsip perataan melalui pemberian fasilitas yang seragam dan pembebasan biaya sewa, namun manfaat ekonomi yang diterima pedagang tidak merata akibat perbedaan nilai strategis posisi kios. Responsivitas pemerintah melalui penyelenggaraan event atau bazar dinilai hanya memberikan dampak keramaian yang bersifat temporer dan belum menjadi solusi jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini tepat sebagai instrumen penataan kota, masih dinilai kurang tepat sebagai strategi ekonomi karena belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik pasar dan perilaku konsumen PKL. Pemerintah Kabupaten Pamekasan diharapkan perlu merumuskan strategi promosi digital harian dan mengintegrasikan *Food Colony* sebagai rute wajib pariwisata kuliner lokal guna menjamin arus pembeli permanen. Diperlukan pula evaluasi berkala terhadap penataan letak kios guna meminimalisir ketimpangan akses pembeli antar pedagang, serta inovasi dalam diversifikasi menu untuk meningkatkan daya tarik kawasan bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Alfiana, R., & Prathama, A. (2022). Evaluasi Kebijakan E-Filing Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 11, 54–64.
- Ambarwati, P., & Wahyudi, K. E. (2024). Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Aplikasi Wargaku. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 13(1), 227–240.
- BPS. (2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah*. Badan Pusat Statistik.
- Dewi, D. S. K. (2021). *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., & Jumiyati, S. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hardani, Andriani, H., & Ustiawaty, J. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Herwanto, M. R., Mukhtar, S., & Herlith. (2025). Pengaruh Modal, Kemasan, Dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Jakarta Timur. *Peradabanjournalofeconomicandbusiness*, 4(2).
<https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i2.320>
- Putra, F. E. S., & Prabawati, I. (2020). EVALUASI APLIKASI E-HEALTH DI PUSKESMAS JAGIR KOTA SURABAYA. *Journal Publika*, 7(8).
<https://doi.org/doi.org/10.26740/publika.v7n8.p%252525p>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suprayitno, Dr. D., Selvia, F., Suparyati, Dr. A., Heryani, Dr. A., & Titalessy, P. B. (2024). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.